

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Secara terminologi, istilah hubungan internasional dikemukakan oleh Jeremy Bentham, seorang yang sangat tertarik pada interaksi antarnegara (Darmayadi, dkk. 2015:22). Hubungan internasional adalah studi tentang interaksi dan transaksi antar aktor di berbagai tingkatan di dunia yang terglobalisasi. Ini dapat menjadi negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah, atau bahkan individu. Hubungan internasional mencakup banyak masalah penting, seperti perang dan perdamaian, ekonomi internasional, politik internasional, hukum internasional, dan organisasi internasional. Bidang studi ini bersifat interdisipliner dan mencakup banyak disiplin ilmu, seperti ilmu politik, ekonomi, sejarah, sosiologi, dan hukum (Robert & Sorensen, 2009:144).

Penelitian mengenai hubungan internasional sebagai bidang akademis yang otonom pertama kali timbul pada abad ke-20 di Wales, Britania Raya. Inisiatif tersebut dimulai ketika para ahli dalam hukum internasional dan filsafat di Wales Britania menyoroti kebutuhan akan bidang kajian yang fokus pada interaksi antarnegara dan bangsa, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan rasional atas konflik bersenjata dan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang dapat diambil demi mencapai perdamaian global (Hadiwinata, 2017:15).

Seiring dengan kemajuan zaman, pola interaksi antarnegara semakin berkembang. Hubungan antarnegara yang dulunya bersifat konvensional, secara perlahan berubah sesuai dengan dinamika modernitas. Interaksi antarnegara yang terjadi, entah itu melibatkan dua negara atau lebih, merupakan bukti bahwa pada dasarnya, baik individu, kelompok, maupun negara sebagai entitas sosial, tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, suatu negara memerlukan kerjasama dan bantuan dari negara lain melalui praktik politik luar negeri.

Secara umum, hubungan internasional mencakup interaksi berbagai aktor, bukan hanya antar negara. Peran negara sebagai aktor utama semakin berkurang dalam konteks global saat ini. Berbagai individu, kelompok, atau entitas lain dengan kepentingan masing-masing juga terlibat dalam interaksi ini, sehingga negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dominan. Negara kini lebih berperan sebagai aktor rasional yang mampu berinteraksi melampaui batas-batas wilayah. Batas-batas antar negara semakin tidak relevan, bahkan beberapa aktor non-negara dapat mengabaikan batas geografis tersebut (Perwita & Yani, 2017:3-4).

Beberapa konsep dasar dalam Hubungan Internasional meliputi:

1. Peran: Merupakan suatu aspek dinamis yang merujuk pada serangkaian tindakan atau perilaku yang diharapkan dari individu atau entitas yang menempati posisi tertentu dalam sebuah sistem.
2. Pengaruh: Didefinisikan sebagai kemampuan aktor politik untuk mempengaruhi perilaku pihak lain sesuai dengan kehendaknya.

3. Kerjasama: Dalam konteks Hubungan Internasional, dikenal istilah kerjasama internasional, di mana berbagai kepentingan nasional dari negara-negara berbeda bertemu untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri masing-masing.
4. Analisis Sistem: Fenomena internasional yang kompleks tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga perlu dilihat sebagai bagian dari sistem yang saling berinteraksi dalam lingkungannya (Perwita dan Yani, 2017:29-34).

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, berakhirnya Perang Dingin menandai masa transisi dunia yang mempengaruhi perkembangan pesat dalam studi Hubungan Internasional. Penelitian ini sekarang tidak hanya berfokus pada politik antarnegara, tetapi juga mencakup berbagai isu seperti terorisme, ekonomi, lingkungan, dan lainnya. Selain itu, hubungan internasional semakin rumit dengan peran penting pihak non-negara dalam interaksi global (Perwita & Yani, 2017:29-34).

Nicholas J. Spykman menjelaskan bahwa hubungan internasional melibatkan berbagai aktivitas yang memiliki perbedaan satu sama lain, seperti komunikasi internasional, transaksi perdagangan, pertandingan olahraga internasional, pariwisata, dan konferensi internasional. Dengan kata lain, hubungan internasional mencakup berbagai jenis kegiatan yang saling berbeda namun terkait, termasuk aspek-aspek seperti komunikasi, perdagangan, olahraga, dan acara-acara internasional (Sitepu, 2011: 29).

Hubungan Internasional modern tidak hanya mempelajari aspek politik, tetapi juga melibatkan berbagai bidang lain seperti ketergantungan ekonomi, kesenjangan antara negara-negara utara dan selatan, masalah pembangunan, perusahaan multinasional, hak asasi manusia, organisasi non-pemerintah internasional, isu lingkungan, gender, dan berbagai topik lainnya (Jackson dan Sorensen, 2014: 34).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan wadah di mana berbagai kepentingan dari berbagai negara dan bangsa bertemu, terutama ketika kepentingan tersebut tidak dapat dipenuhi di dalam negeri masing-masing. Kerjasama ini juga menjadi salah satu aspek dalam Hubungan Internasional, yang berperan sebagai kebalikan dari konflik internasional. Isu utama dalam kerjasama internasional berfokus pada sejauh mana keuntungan bersama yang dihasilkan melalui kerjasama dapat mendukung tindakan yang bersifat sepihak dan kompetitif (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997:418).

Kerjasama dapat terwujud sebagai hasil dari adaptasi perilaku aktor-aktor dalam menanggapi atau mengantisipasi keputusan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama bisa terjadi melalui interaksi yang terjadi secara langsung atau melalui pemahaman bersama sehingga negosiasi tidak lagi diperlukan (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997:418).

Sedangkan menurut Rudy, interaksi antara aktor-aktor di panggung internasional terjadi karena adanya ketidakmerataan sumber daya yang dimiliki oleh setiap negara, yang pada gilirannya memunculkan ketergantungan satu sama lain akibat kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hubungan internasional dalam bentuk kerjasama tidak dapat dihindari dan menjadi sesuatu yang perlu dijaga oleh masing-masing negara. Dengan demikian, kerjasama internasional ini dapat menciptakan harmoni dan memperkuat ikatan persahabatan antara negara-negara yang terlibat (Rudy, 2005: 12).

Kerjasama terjadi ketika individu-individu menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sejalan, serta memiliki pengetahuan dan kendali yang cukup atas diri mereka untuk mencapai kepentingan tersebut. Kerjasama internasional dapat terjadi karena kehidupan internasional mencakup berbagai aspek, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, pertahanan, dan keamanan (Perwita & Yani, 2017:34).

Beberapa aspek yang menjadi fokus perhatian dalam kerjasama internasional adalah sebagai berikut:

1. Peran negara telah bertransformasi menjadi bagian dari jaringan interaksi yang melibatkan politik, militer, ekonomi, dan budaya bersama dengan entitas ekonomi dan masyarakat sipil, sehingga negara tidak lagi berfungsi sebagai satu-satunya pihak dalam politik internasional.
2. Kerjasama internasional tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan nasional negara-negara yang terlibat, tetapi juga oleh peran institusi internasional.

Institusi-institusi ini memiliki kemampuan untuk mengelola beragam kepentingan dari negara-negara anggotanya dan sering kali memiliki kepentingan tersendiri yang dapat mereka dorong dan tegakkan (Sugiono, 2006:6).

Menurut Holsti, kerjasama internasional adalah konsep di mana dua negara atau lebih memiliki kesamaan dalam kepentingan, nilai, atau tujuan, dan mereka bekerjasama untuk mencapainya. Ini bisa tercermin dalam berbagai bentuk, misalnya dengan harapan bahwa kebijakan negara lain akan mendukung kepentingan dan nilai-nilai suatu negara, atau melalui perjanjian tertentu antara negara-negara untuk memanfaatkan kesamaan atau menyelesaikan konflik kepentingan. Aturan resmi atau tidak resmi sering kali dibuat untuk mengatur transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan tersebut, seperti penyelesaian perselisihan perdagangan. Transaksi antar negara juga sering terjadi sebagai hasil dari kesepakatan yang mereka capai, seperti pertukaran barang atau jasa (Holsti, 1983:209-211).

Bentuk-bentuk kerjasama internasional dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pihak yang terlibat, antara lain kerjasama bilateral, multilateral, trilateral, dan regional. Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah kerjasama bilateral, yang menggambarkan hubungan antara dua pihak. Pola interaksi ini terbentuk dari kecenderungan sikap dan tujuan masing-masing pihak yang terlibat dalam hubungan bilateral (Perwita & Yani, 2017: 33).

Kerjasama internasional tidak hanya timbul dari kepentingan bersama yang sejalan, tetapi juga dari ketergantungan bersama antar negara. Ketergantungan ini dapat berasal dari bidang ekonomi (contohnya perdagangan), keamanan (seperti aliansi militer), atau lingkungan (misalnya pengelolaan sumber daya bersama). Saat negara-negara saling bergantung, mereka cenderung memiliki insentif yang kuat untuk bekerjasama dan menemukan solusi bersama untuk masalah yang dihadapi. Kerjasama internasional bisa berhasil meskipun ada ketidakseimbangan kekuatan di antara negara-negara tersebut. Negara yang lebih lemah dapat menggunakan sumber daya selain kekuatan militer, seperti kekuatan ekonomi atau posisi moral, untuk mempengaruhi negara yang lebih kuat agar mau berkolaborasi (Keohane & Nye, 1977:8-12).

2.1.3 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah rencana atau strategi yang disusun oleh para pengambil keputusan suatu negara untuk berinteraksi dengan negara lain atau aktor politik internasional lainnya, dengan tujuan untuk mencapai sasaran nasional tertentu yang dirumuskan dalam kerangka kepentingan nasional. Kebijakan ini, yang diterapkan oleh pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional yang ditetapkan oleh para penguasa pada masa itu. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara serta aktor-aktor dari negara tersebut sering melakukan berbagai jenis kerjasama, seperti kerjasama regional, bilateral, trilateral, dan multilateral (Perwita & Yani, 2017:49).

Setiap negara pasti memiliki hubungan dengan negara lain dalam pelaksanaan pemerintahannya. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan dalam hubungan antarnegara mencakup aspek yang berfokus pada kepentingan domestik dan internasional. Ancaman terhadap negara bisa datang dari dalam maupun luar negeri, dengan ancaman eksternal sering kali menjadi isu yang signifikan karena berasal dari negara lain. Kebijakan luar negeri memiliki karakteristik khas yang dapat dianggap sebagai tujuan utamanya, yaitu menjaga keamanan dan kelangsungan hidup negara. Kebijakan ini merupakan strategi atau rencana tindakan yang dirumuskan oleh para pengambil keputusan di suatu negara untuk berinteraksi dengan negara lain atau aktor lain dalam politik internasional. Menurut Rosenau, tujuan dari kebijakan luar negeri adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari lingkungan internasional (Rudy, 2002:27).

Kebijakan luar negeri dapat dipahami sebagai usaha suatu negara melalui berbagai tindakan dan sikapnya untuk mengelola dan memanfaatkan kondisi eksternal demi kepentingan nasionalnya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup dan keamanan negara. Ketika mempelajari kebijakan luar negeri, seseorang akan menghadapi fenomena yang luas dan kompleks, yang mencakup aspek kehidupan internal dan kebutuhan eksternal negara. Hal ini termasuk aspirasi, atribut nasional, budaya, konflik, kapabilitas, institusi, serta aktivitas rutin yang bertujuan untuk membentuk dan mempertahankan identitas sosial, hukum, dan geografi negara sebagai entitas bangsa (Perwita & Yani, 2017:49).

2.1.4 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan konsep yang sangat dikenal dalam studi hubungan internasional, baik di kalangan pengamat aliran tradisional maupun yang bersifat ilmiah. Konsep ini terutama relevan pada masa ketika negara-negara bangsa masih berperan sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Para ahli umumnya sepakat bahwa faktor utama yang mendorong negara-negara dalam menjalankan interaksi internasional adalah kepentingan nasional mereka (Rudy, 2002:60).

Kepentingan nasional muncul dari kebutuhan suatu negara, dan dapat dilihat dari kondisi internalnya, termasuk aspek politik, ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan ini juga berlandaskan pada upaya menciptakan “kekuatan” yang dapat memberikan dampak langsung pada pertimbangan negara lain untuk mendapatkan pengakuan internasional. Peran negara dalam menentukan dasar dari kepentingan nasional tidak dapat diabaikan, karena hal ini akan menjadi perspektif bagi masyarakat internasional mengenai negara tersebut, terutama dalam konteks hubungan yang terjalin melalui kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual digunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara (Sitepu, 2011:163).

Kepentingan nasional ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan dan pertahanan negara hingga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial, bahkan hingga pemeliharaan kedaulatan dan identitas nasional. Kepentingan nasional sering menjadi fokus utama pemerintah dalam kebijakan domestik dan luar negeri mereka. Ini bisa melibatkan perlindungan dari ancaman luar, upaya pembangunan

ekonomi, pemeliharaan perdamaian dalam negeri, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga negara seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur. (Perwita & Yani, 2017:35).

2.1.5 Ekonomi Politik Internasional

Kebijakan Ekonomi politik internasional merupakan dinamika antara ekonomi dan politik, melibatkan interaksi antara negara dan pasar dalam lingkup internasional. Pasar modern dibangun di atas pondasi aturan politik untuk mencegah munculnya pasar yang tidak teratur. Regulasi dan kebijakan politik menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pasar beroperasi. Pada saat yang sama, kekuatan ekonomi merupakan pondasi krusial bagi kekuatan politik.

Ekonomi politik internasional adalah kajian mengenai hubungan yang saling terkait antara ekonomi dan politik di tingkat global, yang muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan dalam sistem internasional yang terus berkembang. Secara sederhana, kepentingan nasional dapat dipahami sebagai interaksi antara politik dan ekonomi di dunia internasional. Konsep ekonomi politik mencakup dinamika interaksi global antara penguasaan kekuasaan (politika) dan pencarian kekayaan (ekonomi). Dalam kerangka ini, terdapat hubungan timbal balik antara politik dan ekonomi, di mana negara dan pasar berinteraksi untuk memengaruhi distribusi kekuasaan dan kekayaan dalam konteks hubungan internasional (Perwita & Yani 2017:75-76).

Menurut Spero, terdapat empat cara di mana faktor politik memengaruhi ekonomi, yaitu:

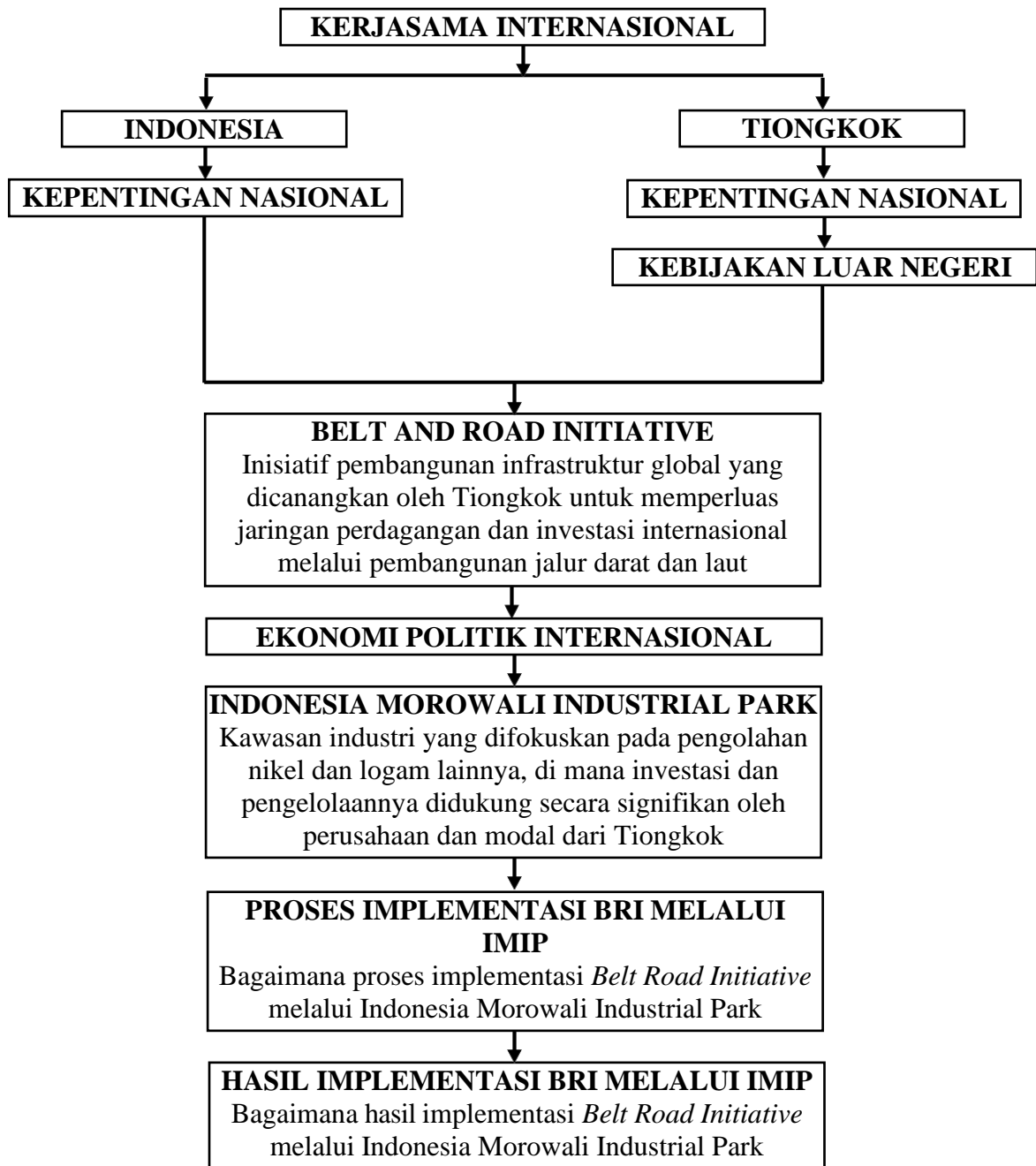
1. Struktur dan operasi sistem ekonomi internasional dipengaruhi oleh struktur dan operasi politik internasional.
2. Kepentingan politik senantiasa memengaruhi kebijakan ekonomi.
3. Kebijakan ekonomi dipandu oleh kepentingan politik.
4. Hubungan dalam ekonomi internasional merupakan interaksi politik di mana negara-negara mengelola konflik dan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu (Perwita & Yani, 2017:76-77).

Ekonomi politik internasional tidak hanya merupakan teori akademis, tetapi juga mencerminkan kompleksitas realitas di mana politik dan ekonomi saling terkait dalam konteks global. Studi ini mengungkap bagaimana kepentingan nasional, baik dalam politik maupun ekonomi, menjadi faktor utama dalam pembentukan kebijakan dan interaksi antarnegara. Dalam perspektif ekonomi politik internasional, kebijakan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konteks politiknya. Sebaliknya, keduanya saling terhubung dan saling mempengaruhi. Kebijakan politik mempengaruhi arah dan bentuk kebijakan ekonomi, sementara keputusan ekonomi dapat membentuk kekuatan politik suatu negara.

2.2 Kerangka Pemikiran

Implementasi *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok di Indonesia melalui Morowali Industrial Park merupakan sebuah studi kompleks yang melibatkan

berbagai aspek kebijakan, investasi, infrastruktur, dan dampak sosial-ekonomi. Bagan kerangka berpikir ini dimulai dengan kontekstualisasi kebijakan pemerintah Indonesia terhadap BRI, mencakup regulasi dan arah kebijakan yang mendukung integrasi inisiatif tersebut dalam strategi pembangunan nasional. Ini diikuti dengan pemahaman mendalam mengenai elemen-elemen BRI yang berpengaruh, seperti investasi infrastruktur yang besar dan kolaborasi internasional yang terstruktur. Peran pemerintah Indonesia dalam memfasilitasi implementasi BRI di Morowali, termasuk pembangunan infrastruktur kritis dan promosi investasi asing langsung (FDI), menjadi fokus penting dalam bagan ini. Morowali Industrial Park, sebagai studi kasus utama, memperlihatkan bagaimana BRI direalisasikan melalui pengembangan industri berbasis sumber daya alam, seperti smelter nikel, serta dampaknya terhadap ekonomi lokal, tantangan keberlanjutan lingkungan, dan integrasi sosial masyarakat lokal. Analisis ini menyediakan pandangan menyeluruh tentang bagaimana inisiatif global seperti BRI dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia, sambil juga mengevaluasi implikasi sosial dan lingkungan yang terkait.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran